



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MOEWARDI**

Jalan Kolonel Sutarto No.132 Surakarta Kode Pos 57126 Telp. (0271) 634634,  
Faximile (0271) 637 412, Email : [rsmoewardi@jatengprov.go.id](mailto:rsmoewardi@jatengprov.go.id)  
Website : [rsmoewardi.jatengprov.go.id](http://rsmoewardi.jatengprov.go.id)

LAW REGULATION WORKSHEET  
RSUD Dr. MOEWARDI

UNDANG – UNDANG

	Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
	Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
	Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
	Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
	Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
	Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
	Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
	Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan

KEPUTUSAN PRESIDEN

	Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1998 tentang Badan Pengawas Tenaga Nuklir;
--	---

PERATURAN PRESIDEN

	Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil;
	Peraturan Pemerintah RI Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
	Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
	Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;
	Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

	Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
	Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2013 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;
	Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2013 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;
	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;
	Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Dalam Jabatan Struktural;
	Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
	Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
	Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil;
	Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Anggota Partai Politik;
	Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korp Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
	Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2004 tentang Kampanye Pemilihan Umum Oleh Pejabat Negara;
	Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2005 tentang Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Rangkap;
	Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil;
	Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional;
	Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2006 tentang Perpindahan Menjadi Pegawai Negeri Sipil Pusat Dan Pegawai Negeri Sipil Daerah;
	Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2006 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Dan Janda/Dudanya;
	Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Peraturan Gaji Bagi Pegawai Negeri Sipil;
	Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
	Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 85 tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun;

## PERATURAN MENTERI

	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 415a/MENKES/PER/V/1987 tentang Peningkatan Efisiensi Kerja Tenaga Medik Di Rumah Sakit Pemerintah;
	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 159b/Menkes/Per/II/1998 tentang Struktur Organisasi Rumah Sakit;
	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 512/MENKES/PER/IV/2007 tanggal 20 April 2007 tentang Praktik Dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran Penyelenggaraan Praktik Dokter dan Dokter gigi;
	Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/17/M.PAN/9/2008 tentang Jabatan Fungsional Dokter Pendidik Klinis Dan Angka Kreditnya;

	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 340/MENKES/PER/III/2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit;
	Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 07/KEP/M.PAN/12/1999 tentang Jabatan Fungsional Asisten Apoteker Dan Angka Kreditnya;
	Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 07/KEP/M.PAN/2/2000 tentang Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kesehatan Dan Angka Kreditnya;
	Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 58/KEP/M.PAN/8/2000 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat Dan Angka Kreditnya;
	Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 22/KEP/M.PAN/4/2001 tentang Jabatan Fungsional Perawat Gigi Dan Angka Kreditnya;
	Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 93/KEP/M.PAN/11/2001 tentang Jabatan Fungsional Bidan Dan Angka Kreditnya;
	Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 94/KEP/M.PAN/11/2001 tentang Jabatan Fungsional Perawat Dan Angka Kreditnya;
	Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 133/KEP/M.PAN/12/2002 tentang Jabatan Fungsional Radiografer Dan Angka Kreditnya;
	Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 41/KEP/M.PAN/4/2003 tentang Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis Dan Angka Kreditnya;
	Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 135/KEP/M.PAN/12/2002 tentang Jabatan Fungsional Perekam Medis Dan Angka Kreditnya;
	Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 141/KEP/M.PAN/11/2003 tentang Jabatan Fungsional Dokter Gigi Dan Angka Kreditnya;
	Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 140/KEP/M.PAN/11/2003 tentang Jabatan Fungsional Apoteker Dan Angka Kreditnya;
	Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2005 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri, Pemerintah Daerah Dan Pimpinan Serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
	Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/3/M.PAN/3/2009 tentang Jabatan Fungsional Arsiparis Dan Angka Kreditnya;
	Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pedoman Perhitungan Jumlah Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Untuk Daerah;
	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien
	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor Hk.02.02/Menkes/148/I/2010 Tentang Izin Dan Penyelenggaraan Praktik Perawat
	Peraturan Menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 148 Tahun 2010 tentang Parktik Keperawatan
	Permenkes No. 5380/IX/1963 tentang Wewenang bidan terbatas pada pertolongan persalinan normal secara mandiri, didampingi tugas lain.
	Permenkes 623/1989 tentang Wewenang bidan dibagi menjadi dua yaitu wewenang umum dan khusus ditetapkan bila bidan melaksanakan tindakan khusus di bawah pengawasan dokter

	Permenkes No. 572/VI/1996 tentang Registrasi dan praktek bidan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
	Kep.Menpan Nomor 133/Kep/MPAN/12/2002 tentang Jabatan Fungsional Radiografer dan Angka Kreditnya
	Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Ka. BKN Nomor 049/Menkes/SKB/1/2003 Pan Nomor 1 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Radiografer dan Angka Kreditnya
	Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
	PMK RI No. 13 / 2014 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika
	PMK RI No. 21 / 2013 tentang Peangulangan HIV / AIDS
	Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 340/Menkes/PER/III/2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit
	PMK RI No. 54 / 2014 tentang Klasifikasi dan Perijinan Rumah Sakit
	PMK RI No. 73 / 2013 tentang Jabatan Fungsional umum
	PMK RI No. 78 / 2014 tentang Skrining Hipotiroid Konginental
	PMK RI No. 83 / 2014 tentang Unit Darah Transfusi Darah, BDRS, dan Jejaring Pelayanan Transfusi Darah.
	PMK RI No. 69 / 2015 tentang Standar Kompetensi Manajerial Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kesehatan.
	Permenkes No. 411/Menkes/Per/III/2010 tentang Laboratorium Klinik
	Permenkes No. 43/Menkes/SK/2013 tentang Cara Penyelenggaraan Laboratorium klinik Yang Baik
	Permenkes No. 42/Menkes/SK/2015 tentang Ijin Penyelenggaraan Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik
	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1197/Menkes/SK.X/2004 ISBN Nomor 978-879-9259-70-2 tentang Pelayanan Farmasi;
	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Farmasi;
	Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1204 Tahun 2004 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit;
	Keputusan Menteri Kesehatan Republik Nomor 772/Menkes/SK/VI/2002 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit;
	Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
	Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/61/M.PAN/6/2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan;
	Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/75/M.PAN/7/2004 tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja Dalam Rangka Penyusunan Formasi Pegawai Negeri Sipil;
	Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah;
	Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 755 Tahun 2011 tentang Komite Medis;
	Keputusan Bersama Menteri Kesehatan Dan Kesejahteraan Sosial Dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 393/MENKES-KESOS/SKB/V/2001 Nomor 18 Tahun 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Sanitarian Dan Angka Kreditnya;
	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 58/MenLH/12/1995 tanggal 21 Desember 1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Rumah Sakit.

	Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1204/MenKes/SK/X/2004 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit
	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 58/MenLH/12/1995 tanggal 21 Desember 1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Rumah Sakit
	Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1204/MenKes/SK/X/2004 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit
	Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1239 Tahun 2001 tentang Registrasi dan Praktik Perawat.
	Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah